

**PERAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI**

Yoga Narendra Panggabean
NPP. 32.0111

*Asdaf Kabupaten Dairi Utara Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: Yogapanggabean@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This research is motivated by a gap between the ideal regulations regarding the role of the Civil Protection Unit (Satlinmas), as outlined in Ministry of Home Affairs Regulation No. 26 of 2020, and the actual implementation in Siempat Nempu Hulu Sub-district. Ideally, Satlinmas members should be of productive age, have an adequate level of education, and receive sufficient training and facilities. However, in reality, most members are over 60 years old, 13 have no formal education, and both training and facilities are very limited. Meanwhile, incidents of public disorder and natural disasters continue to increase, highlighting the urgent need to optimize Satlinmas' role systematically.* **Purpose:** *To analyze the role of Satlinmas in maintaining public order, safety, and community protection in Siempat Nempu Hulu Sub-district.* **Method:** *This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis refers to the role theory of Biddle and Thomas (in Sarwono, 2015), consisting of five elements: expectation, norm, performance, evaluation, and sanction. This framework assesses the alignment between the expected role of Satlinmas and its actual implementation, including supporting and inhibiting factors.* **Results/Findings:** *The study reveals that the role of Satlinmas is generally suboptimal. In the expectation dimension, government expectations for Satlinmas to act as village-level protectors have not been fully realized, though there are good practices in Kuta Tengah and Lae Nuaha Villages. In the norm dimension, funding and operational regulations are not fully implemented, and regional government support remains minimal. Regarding performance, activities are incidental and lack a structured work program, relying heavily on village initiatives. The evaluation dimension shows performance is assessed informally by village heads and local advisors, without a structured reward or sanction system. In the sanction dimension, no formal mechanisms exist for inactive members, weakening accountability.* **Conclusion:** *Serious attention is needed from the local government in terms of capacity building, provision of facilities, and policies that support Satlinmas professionalism. Optimization efforts can be pursued through continuous training, regular performance evaluations, and enhanced inter-institutional coordination to ensure a safe, orderly, and protected community.* **Keywords:** *Satlinmas, Public Order, Community Protection*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi ideal mengenai peran Satlinmas berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan realitas pelaksanaan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Secara ideal, Satlinmas seharusnya terdiri dari anggota usia produktif, berpendidikan layak, serta mendapat pelatihan dan fasilitas yang memadai. Namun, di lapangan, sebagian besar anggota berusia di atas 60 tahun, 13 orang tidak bersekolah, dan pelatihan serta dukungan fasilitas sangat terbatas. Sementara itu, kasus gangguan ketertiban dan bencana alam terus meningkat, menunjukkan perlunya optimalisasi peran Satlinmas secara sistemik. **Tujuan:** Menganalisis peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (pelaksanaan), *evaluation* (penilaian), dan *sanction* (sanksi). Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara harapan terhadap peran Satlinmas dan pelaksanaannya di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas peran tersebut. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran Satlinmas belum berjalan optimal. Pada dimensi *expectation*, harapan dari pemerintah agar Satlinmas menjadi pelindung utama di desa belum sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat praktik baik di Desa Kuta Tengah dan Lae Nuaha. Pada dimensi *norm*, regulasi pendanaan dan operasional belum diterapkan sesuai aturan, dan dukungan pemerintah daerah masih minim. Dalam hal *performance*, kegiatan Satlinmas masih bersifat insidental tanpa program kerja rutin, dan sangat bergantung pada inisiatif desa. Dimensi *evaluation* menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara informal oleh kepala desa dan pembina, namun belum dilengkapi sistem reward dan sanksi yang terstruktur. Pada dimensi *sanction*, belum ada mekanisme sanksi formal bagi anggota yang tidak aktif, sehingga penegakan kedisiplinan lemah. **Kesimpulan:** Diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal pembinaan, penyediaan fasilitas, dan kebijakan yang mendukung profesionalisme Satlinmas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, dan peningkatan koordinasi antar instansi untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi.

Kata kunci: Satlinmas, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tanggung jawab ini dipegang oleh seluruh elemen pemerintahan pusat dan daerah. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Tumalavicius, Ivančiks, dan Karpishchenko (2016), dalam era globalisasi, keamanan dan ketertiban masyarakat menuntut respons yang terstruktur dari pemerintah lokal, termasuk penguatan kelembagaan yang berbasis komunitas seperti Satlinmas, untuk menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. Penegakan ketertiban dan ketenteraman oleh aparat sipil, seperti Satpol PP dan

Satlinmas, sangat krusial dalam merespons kompleksitas sosial di tingkat lokal. Rukmana dan Ip (2019) menunjukkan bahwa peran ketertiban publik memerlukan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia yang terlatih, dan kejelasan tugas, sebagaimana dibutuhkan pula oleh Satlinmas dalam konteks desa. Untuk itu, dibentuk Satlinmas di setiap desa/kelurahan sebagai garda terdepan menjaga ketertiban dan membantu penanganan bencana serta kegiatan sosial.

Tabel 1.
Data Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Siempat Nempu Hulu Tahun 2022-2023

JENIS KEJADIAN	2022	2023	Total	PERSENTASE (%)
perselisihan	8	9	17	68%
Perkelahian	2	2	4	16%
Pencurian	1	2	3	12%
asusila	-	1	1	4%
TOTAL	11	14	25	100%

Sumber : Pemerintah kecamatan Siempat Nempu hulu, Diolah oleh peneliti 2024

Situasi keamanan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu cukup dinamis. Data menunjukkan pelanggaran ketertiban meningkat dari 11 kasus pada 2022 menjadi 14 kasus pada 2023. Perselisihan paling banyak terjadi (68%), diikuti perkelahian, pencurian, dan kasus asusila. Peningkatan ini menandakan perlunya personel Satlinmas yang terlatih dan sigap dalam menghadapi gangguan ketertiban.

Kecamatan ini juga rentan bencana alam dengan 15 kejadian selama 2022–2023, didominasi oleh tanah longsor (60%). Bencana ini menyebabkan korban jiwa dan kerusakan rumah, disertai banjir dan angin kencang yang menimbulkan kerugian dan pengungsian. Dalam situasi darurat, Satlinmas sangat dibutuhkan untuk evakuasi, distribusi bantuan, dan menjaga ketertiban di lokasi bencana. Peran Satlinmas dalam kondisi darurat telah menjadi bagian penting dari manajemen bencana berbasis komunitas. Menurut Eviany dan Sutiyo (2023), perlindungan masyarakat bukan hanya terkait pengamanan, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana secara terpadu di tingkat lokal.

Tabel 2.
Data Satlinmas Kecamatan Siempat Nempuhulu menurut Jenjang Pendidikan.

No.	DESA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH (ORANG)
		SD	SMP	SMA	TIDAK SEKOLAH	
1	<u>Bakal Julu</u>	2	2	1	1	6
2	<u>Gunung Meriah</u>	3	2	-	1	6
3	<u>Kuta Tengah</u>	1	3	1	3	8
4	<u>Lae Nuaha</u>	4	3	-	1	8

5	<u>Pandan</u>	4	3	-	1	6
6	<u>Pangaribuan</u>	3	1	1	3	4
7	<u>Sigambir Gambir</u>	1	1	6	-	4
8	<u>Silumboyah</u>	1	3	2	2	8
9	<u>Sipoltong</u>	-	4	4	-	6
10	<u>Sungai Raya</u>	3	-	5	-	10
11	<u>Tambahan</u>	2	-	6	-	6
12	<u>Tualang</u>	-	4	3	1	6
JUMLAH		24	26	29	13	78

Sumber : *Data Kecamatan Siempat Nempuhulu*

Namun, efektivitas Satlinmas belum optimal karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama dari sisi pendidikan dan usia. Dari 78 anggota, sebagian besar berpendidikan rendah, bahkan 13 orang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hal ini belum sesuai dengan standar Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yang menetapkan minimal lulusan SD dan diutamakan SMP atau sederajat.

Tabel 3.

Data Satlinmas Kecamatan Siempat Nempuhulu Satlinmas menurut Usia

No.	DESA	JENIS KELAMIN	USIA		JUMLAH (ORANG)
			PRODUKTIF (18-59) TAHUN	NON- PRODUKTIF 60 TAHUN KEATAS	
1	Bakal Julu	Laki-Laki	2	4	6
2	Gunung Meriah	Laki-Laki	2	4	6
3	Kuta Tengah	Laki-Laki	3	5	8
4	Lae Nuaha	Laki-Laki	4	4	8
5	Pandan	Laki-Laki	2	4	6
6	Pangaribuan	Laki-Laki	1	3	4
7	Sigambir Gambir	Laki-Laki	1	3	4
8	Silumboyah	Laki-Laki	4	4	8
9	Sipoltong	Laki-Laki	3	3	6
10	Sungai Raya	Laki-Laki	6	4	10
11	Tambahan	Laki-Laki	2	4	6
12	Tualang	Laki-Laki	3	3	6
JUMLAH			33	45	78

Sumber : *Data Kecamatan Siempat Nempuhulu*

Selain pendidikan, banyak anggota Satlinmas berusia non-produktif (60 tahun ke atas), yaitu 45 dari 78 orang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Permendagri yang membatasi masa keanggotaan hingga usia 60 tahun. Kondisi ini menurunkan kemampuan fisik dan respons anggota dalam menghadapi keadaan darurat, sehingga mengurangi efektivitas tugas mereka.

Dari jumlah personel, Kecamatan Siempat Nempu Hulu memiliki jumlah Satlinmas relatif rendah (78 orang), dibanding kecamatan lain seperti Sumbul dan Tanah Pinem yang masing-masing memiliki 152 personel. Meski memenuhi standar minimal Perbup Dairi Nomor 10 Tahun 2021, jumlah ini masih kurang untuk menangani berbagai tantangan ketertiban dan bencana

Pelaksanaan tugas Satlinmas belum mendapat dukungan memadai, terutama dalam peningkatan kapasitas dan pemenuhan hak anggota seperti pelatihan, perlengkapan, kartu identitas, piagam penghargaan, dan biaya operasional. Banyak hak anggota belum terpenuhi sehingga minat masyarakat usia produktif bergabung rendah, sehingga kinerja Satlinmas belum optimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat kesenjangan antara peran ideal Satlinmas yang diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan kondisi riil di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Satlinmas seharusnya diisi oleh anggota yang kompeten, berusia produktif, dan terlatih. Namun, kenyataannya didominasi oleh anggota berusia lanjut dengan pendidikan rendah, minim pelatihan, dan fasilitas yang terbatas. Penelitian sebelumnya belum menyoroti secara mendalam kondisi ini, sehingga diperlukan kajian untuk menganalisis kesenjangan tersebut dan merumuskan upaya optimalisasi peran Satlinmas di daerah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Meskipun terdapat beberapa kajian yang membahas peran Satlinmas di berbagai daerah, namun belum ada yang secara spesifik meneliti kesenjangan antara regulasi dan realitas pelaksanaan peran Satlinmas di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, terutama terkait usia, tingkat pendidikan, serta keterbatasan sarana dan pelatihan. Arifin (2015) meneliti pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Desa Tani Harapan dan menemukan bahwa pemahaman peran serta fasilitas pendukung masih minim. Kinasih dan Pramono (2018) mengkaji optimalisasi peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan, Surakarta, dan menemukan bahwa meskipun sudah berjalan baik, masih terdapat hambatan di lapangan. Gunawan (2015) menyoroti pentingnya pelatihan dalam meningkatkan peran Satlinmas di Kabupaten Cilacap. Azima (2019) dalam penelitiannya di Desa Selat, Lombok Barat, menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan. Sementara itu, Kurniawan (2024) mengkaji peran Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan menyimpulkan bahwa peran tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini mengisi celah (gap) dengan mengangkat konteks lokal dan permasalahan aktual di Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengangkat secara spesifik persoalan implementasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya melihat pelaksanaan peran Satlinmas secara umum, tetapi juga mengkaji lebih dalam mengenai kesenjangan antara regulasi dengan realitas lapangan, khususnya terkait kondisi demografis anggota Satlinmas seperti usia lanjut dan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menggunakan teori peran Biddle dan Thomas sebagai alat analisis yang komprehensif untuk menilai harapan, norma, pelaksanaan, evaluasi, dan sanksi terhadap peran Satlinmas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual, tetapi juga menyusun dasar argumentatif dan rekomendatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Satlinmas melalui kebijakan yang tepat sasaran. Fokus wilayah yang belum banyak dijadikan lokus penelitian sebelumnya juga memperkuat nilai kebaruan dari penelitian ini.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut guna mengoptimalkan kinerja Satlinmas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Simangunsong (2017) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap fenomena sosial berdasarkan perspektif pelaku, konteks, dan makna yang dimiliki subjek penelitian. Sejalan dengan itu, Suhendi (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendekatan ini efektif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas aparat penegak ketertiban dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam operasional konsep, penelitian ini mengacu pada teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono(2015), yang dijelaskan melalui lima indikator utama, yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian), dan *sanction* (sanksi). Konsep ini digunakan untuk memahami peran Satlinmas dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat di lingkungan desa dan kelurahan. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Rukmana (2020), pemahaman terhadap indikator peran sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana aparat daerah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, Camat Siempat Nempu Hulu, Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Nempu, anggota

Satlinmas, dan masyarakat. Mereka dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi substantif mengenai kebijakan, pelaksanaan tugas, serta persepsi terhadap efektivitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, serta data statistik yang relevan. Teknik ini sesuai dengan metode yang digunakan oleh Damara (2020), yang menggabungkan data primer dan sekunder untuk mengkaji implementasi kebijakan penertiban oleh Satpol PP secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari narasumber secara lebih mendalam dan fleksibel, sementara observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik dan dinamika peran Satlinmas di lapangan. Dokumentasi berfungsi untuk menguatkan dan melengkapi informasi dari wawancara dan observasi. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pola, tema, dan hubungan antar informasi secara sistematis. Pendekatan ini merujuk pada analisis tematik menurut Braun dan Clarke (2006), yang menekankan proses identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi tema secara sistematis dalam data kualitatif. Bradley, Curry, dan Devers (2007) juga menekankan pentingnya pengembangan tema dan taksonomi dalam analisis kualitatif untuk menghasilkan teori yang relevan dengan konteks kebijakan lokal. Untuk mempertajam validitas analisis, peneliti juga mengacu pada pendekatan triangulasi data sebagaimana dijelaskan oleh Douglas (2022), yang menekankan pentingnya membandingkan berbagai sumber dan teknik dalam proses interpretasi hasil. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, selama periode Februari hingga April 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi masalah dan karakteristik Satlinmas setempat. Durasi tiga bulan dimanfaatkan untuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data secara bertahap sesuai ketersediaan informan dan akses lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

1. *Expectation* (harapan)

Setelah melakukan pengkajian dan analisis lapangan, penulis menemukan bahwa pelaksanaan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat di Satpol PP Kabupaten Dairi menyatakan bahwa secara umum peran Satlinmas di Kabupaten Dairi belum terlaksana dengan baik, termasuk di wilayah penelitian. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta minimnya dukungan sarana dan prasarana.

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi di Satpol PP Kabupaten Dairi juga menyampaikan bahwa mayoritas anggota Satlinmas di Kabupaten Dairi berada pada usia non-produktif, yang tentunya memengaruhi kualitas kinerja mereka. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya regenerasi anggota Satlinmas agar diperoleh personel yang lebih muda dan tangguh secara fisik maupun kompetensi. Ini menjadi

tantangan serius dalam peningkatan efektivitas Satlinmas di lapangan.

Camat Siempat Nempu Hulu sebagai pembina Satlinmas menyampaikan bahwa pihak kecamatan memiliki harapan besar agar Satlinmas dapat menjadi pengaman utama di tingkat desa sekaligus promotor kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan tersebut yang menjelaskan bahwa Satlinmas harus memahami seluruh program desa dan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan administratif.

Dari sisi kesejahteraan, motivasi anggota Satlinmas dinilai masih rendah. Penulis mencatat hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Meriah dan Kepala Desa Bakkal Julu yang menyebutkan bahwa orientasi sebagian anggota Satlinmas masa kini lebih berfokus pada insentif yang diterima ketimbang semangat pengabdian seperti generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pola pikir anggota Satlinmas, sehingga berdampak pada rendahnya semangat dan partisipasi aktif mereka dalam keseharian, kecuali pada saat-saat tertentu atau acara resmi desa.

Namun, kondisi yang berbeda ditemukan di Desa Kuta Tengah dan Desa Lae Nuaha. Di Kuta Tengah, penulis mencatat bahwa Satlinmas diberdayakan secara aktif, antara lain dengan melakukan pengamanan kantor desa dan patroli ke wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan ketertiban. Kepala desa setempat memanfaatkan keterlibatan ini sebagai strategi untuk memberikan insentif secara tidak langsung. Satlinmas juga dilibatkan dalam kegiatan pembagian bantuan, musyawarah desa, serta pengamanan protokol kesehatan dalam acara simbolis desa.

Di Desa Lae Nuaha, pemberdayaan Satlinmas dilakukan melalui sistem patroli mingguan, yang dilaksanakan oleh satu regu setiap minggunya. Meski dana desa tidak dapat digunakan untuk kegiatan Satlinmas berdasarkan aturan pemerintah pusat, kepala desa berupaya mengalokasikan dana dari Pendapatan Asli Desa (PAD), meskipun terbatas. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan dan fungsi perlindungan masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Kedua desa ini menunjukkan contoh positif dari bentuk pemberdayaan Satlinmas di tengah keterbatasan yang ada.

2. **Norm (Norma)**

Peraturan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021 menjadi pedoman bagi kepala desa dalam pembinaan dan penerapan kebijakan terkait perlindungan masyarakat, termasuk pendanaan Satlinmas yang seharusnya bersumber dari APBD, APBDes, dan dana sah lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan Satlinmas dapat berasal dari APBN hingga APBDes. Namun, hasil observasi penulis di beberapa desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Pendanaan Satlinmas masih sangat bergantung pada Pendapatan Asli Desa (PADes), yang penggunaannya sering kali disesuaikan dengan program-program desa lain. Kepala Desa Gunung Meriah menjelaskan bahwa PAD desanya belum bisa sepenuhnya difokuskan untuk Satlinmas karena ada prioritas program lainnya. Senada dengan itu, Kepala Desa Bakkal Julu menyatakan bahwa belum ada regulasi teknis lanjutan dari pemerintah daerah terkait pendanaan Satlinmas, sehingga upaya pembiayaan masih berdasarkan inisiatif masing-masing kepala desa. Akibatnya, dukungan terhadap

kesejahteraan Satlinmas masih terbatas dan belum sebanding dengan tugas yang mereka emban. Di lapangan, peran Satlinmas masih difokuskan pada pengamanan desa dan pelaksanaan program pemerintah desa, belum menjangkau tugas lain seperti penanganan bencana sebagaimana diamanatkan Permendagri. Padahal, seperti diungkapkan El-Khoury (2011), keberadaan aktor-aktor lokal seperti Satlinmas sangat penting dalam mendeteksi dan merespons cepat terhadap potensi bencana dan kriminalitas lingkungan di tingkat komunitas. Kondisi ini diperkuat dari wawancara dengan anggota Satlinmas yang menginginkan regulasi yang lebih spesifik dan kuat agar hak serta jaminan mereka dalam menjalankan tugas lebih jelas dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, peran dan pendanaan Satlinmas masih bergantung pada kebijakan pemerintah desa tanpa dukungan teknis yang memadai dari tingkat kabupaten.

3. *Performance (Wujud Harapan)*

Kemampuan petugas Satlinmas dalam melaksanakan tugas merupakan aspek penting dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa. Berdasarkan hasil observasi di beberapa desa, diketahui bahwa secara umum kemampuan petugas Satlinmas sudah cukup baik, terutama dalam menjalankan fungsi pengamanan dan penjagaan di kantor desa maupun dalam menjaga ketertiban masyarakat. Namun di Desa Kuta Tengah, Satlinmas berada dalam kondisi vakum dan tidak menjalankan kegiatan harian secara rutin. Kepala desa menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena masing-masing anggota memiliki kesibukan pribadi dan kurangnya motivasi akibat tidak tersedianya anggaran khusus untuk mendukung kegiatan Satlinmas.

Satlinmas merupakan bagian dari lembaga desa yang berfungsi sebagai pelaksana perlindungan masyarakat di tingkat desa. Tugas Satlinmas telah diatur dalam Permendagri dan Perbup, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih bersifat terbatas. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Satlinmas tidak memiliki program kerja mandiri yang terstruktur, melainkan hanya mengikuti dan menyesuaikan diri dengan program-program desa yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Kepala Desa Gunung Meriah menyatakan bahwa tidak ada jadwal kegiatan rutin khusus untuk Satlinmas, kecuali program pelatihan atau pembinaan yang dijadwalkan secara berkala.

Fungsi Satlinmas lebih banyak berperan sebagai pendukung pelaksanaan program-program desa, seperti pengamanan saat penyaluran bantuan langsung tunai, pengamanan kegiatan musyawarah desa, dan acara seremonial lainnya. Selain itu, Satlinmas juga terlibat dalam kegiatan masyarakat yang tidak terjadwal, seperti hajatan atau acara sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa program kerja Satlinmas lebih bersifat momentum dan tidak terencana secara mandiri, sehingga keterlibatan mereka sangat bergantung pada inisiatif pemerintah desa.

Dalam hal pembinaan, penting bagi Satlinmas untuk terus menjalani pelatihan dan evaluasi agar kompetensi mereka tetap terjaga dan berkembang. Menurut Mangunhajana, pembinaan merupakan proses belajar yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu untuk menunjang efektivitas kerja. Pembinaan juga menjadi sarana penyampaian informasi terbaru terkait regulasi, serta menjadi media untuk membangun semangat dan motivasi personil Satlinmas agar tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Desa Lae Nuaha menyampaikan bahwa pembinaan Satlinmas dijadikan sebagai ajang untuk menyampaikan regulasi baru serta memberikan dorongan semangat

kepada anggota agar tetap berkomitmen. Camat Siempat Nempu Hulu menambahkan bahwa pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan zaman dan tuntutan peran yang semakin kompleks. Hal ini penting agar Satlinmas mampu meningkatkan kualitas diri dan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.

Kepala Desa Bakkal Julu juga menyatakan bahwa pembinaan seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk investasi terhadap sumber daya manusia Satlinmas. Jika pembinaan tidak dilakukan secara konsisten, maka kompetensi anggota Satlinmas akan menurun dan semangat pengabdian pun berpotensi luntur. Oleh karena itu, pembinaan bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai kebutuhan strategis dalam menjaga keberlanjutan peran Satlinmas sebagai pelindung masyarakat di tingkat desa.

4. *Evaluation (Evaluasi)*

Penilaian kinerja merupakan proses penting dalam mengukur dan mengevaluasi sejauh mana anggota organisasi melaksanakan tugasnya secara efektif. Dalam konteks Satlinmas, penilaian kinerja diperlukan untuk mengetahui kendala dan penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk ke depannya. Satlinmas memiliki tugas yang jelas berdasarkan peraturan daerah maupun peraturan pusat, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui berbagai hambatan, baik dari faktor internal seperti semangat kerja yang menurun, maupun eksternal seperti kurangnya dukungan dana dan pembinaan.

Hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Siempat Nempu Hulu menunjukkan bahwa evaluasi kinerja Satlinmas dilakukan langsung oleh kepala desa bersama dengan pembina terdekat seperti Babinkamtibmas dan Babinsa. Di Desa Lae Nuaha, misalnya, evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin yang membahas kegiatan Satlinmas dan menilai capaian serta hambatan yang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut, kepala desa bersama aparat pembina menerima masukan dari anggota Satlinmas, lalu membahas solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Namun demikian, sistem evaluasi ini belum disertai dengan penerapan sanksi atau hukuman terhadap anggota Satlinmas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala Desa Gunung Meriah menyampaikan bahwa karena Satlinmas terdiri dari masyarakat yang secara sukarela mengabdikan diri, maka tidak ada kewenangan yang kuat untuk memberikan sanksi. Pemerintah desa hanya dapat memberikan arahan dan motivasi, sementara pelaksanaan tugas bergantung pada keikhlasan dan kesadaran masing-masing anggota. Hal ini menjadi salah satu faktor sulitnya mengontrol tingkat keefektifan kinerja Satlinmas secara menyeluruh.

Para kepala desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu menyampaikan harapan agar ada regulasi lanjutan dari pemerintah daerah yang tidak hanya mengatur tugas dan fungsi Satlinmas, tetapi juga memberikan jaminan atas hak dan kesejahteraan mereka. Jika hak-hak dasar seperti insentif dan perlindungan dijamin secara regulatif, maka pemerintah desa akan lebih mudah dalam menuntut tanggung jawab kinerja dari para anggota Satlinmas.

Dalam praktiknya, bentuk penghargaan atau reward telah diterapkan di beberapa desa sebagai motivasi tambahan bagi anggota Satlinmas. Kepala Desa Bakkal Julu menjelaskan bahwa pada momen-momen tertentu seperti pengumuman pemilihan umum, anggota Satlinmas diberikan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan atas kerja

keras mereka. Selain itu, ada pula bentuk penghargaan lainnya seperti pengakuan atas pengabdian jangka panjang, yang diberikan pada kegiatan tingkat kabupaten seperti jambore Satlinmas atau pelatihan.

Meskipun bentuk penghargaan ini belum terstruktur dalam sistem insentif berkelanjutan, langkah tersebut dinilai cukup membantu meningkatkan semangat dan loyalitas anggota Satlinmas. Namun, untuk mendukung kinerja yang lebih optimal, diperlukan sistem reward dan sanksi yang lebih formal serta terintegrasi dengan regulasi daerah. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Satlinmas sebagai bagian penting dari upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman di desa.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi belum berjalan secara optimal dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti rendahnya tingkat pendidikan anggota, dominasi usia lanjut, serta minimnya fasilitas dan pelatihan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin (2015) yang menyatakan bahwa implementasi tugas dan fungsi Satlinmas di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan juga belum berjalan dengan baik karena kendala serupa, yakni rendahnya sumber daya manusia dan dukungan fasilitas yang minim.

Sama halnya dengan temuan penelitian Gunawan (2015) di Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa keterbatasan jangkauan pelayanan serta kurangnya kompetensi anggota Satlinmas menjadi persoalan utama, hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi Satlinmas melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugasnya. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen Gunawan bahwa peningkatan kapasitas personel menjadi syarat mutlak dalam optimalisasi peran Satlinmas. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kurhayadi (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan profesionalisme dan kapasitas Satlinmas di Kota Bandung sangat bergantung pada program pelatihan yang berkelanjutan, rekrutmen usia produktif, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik secara efektif.

Berbeda dengan penelitian Wulan Kinasih dan Joko Pramono (2018) di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang menunjukkan bahwa upaya optimalisasi peran Satlinmas sudah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat hambatan teknis di lapangan, pada konteks Kecamatan Siempat Nempu Hulu upaya optimalisasi tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan belum adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam merekrut anggota usia produktif serta minimnya insentif bagi anggota Satlinmas.

Temuan ini juga menolak sebagian dari hasil penelitian Azima (2019) di Desa Selat, Lombok Barat, yang menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan utama pelaksanaan peran Satlinmas. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat justru cukup baik, ditunjukkan oleh semangat pengabdian para anggota, tetapi terkendala oleh faktor internal organisasi dan dukungan kebijakan yang kurang memadai.

Sementara itu, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Kurniawan (2024) yang menyatakan bahwa Satlinmas memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan seperti pemilihan kepala desa, dan optimalisasinya bergantung pada

pembinaan serta dukungan dari pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa koordinasi antara Satlinmas dan pihak kecamatan maupun Satpol PP sangat diperlukan agar peran Satlinmas tidak hanya menjadi simbolis tetapi betul-betul fungsional di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat multidimensional dan menuntut intervensi kebijakan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk regulasi, pembinaan berkelanjutan, hingga peningkatan kesejahteraan anggota Satlinmas. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi baru dalam penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial seperti Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satlinmas di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi belum berjalan secara optimal dalam mendukung ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan anggota, dominasi usia lanjut, keterbatasan personel, serta minimnya pelatihan dan fasilitas penunjang. Meski begitu, semangat pengabdian anggota dan dasar hukum yang kuat menjadi faktor pendukung yang penting. Upaya seperti pelatihan dan peningkatan koordinasi telah dilakukan, namun belum cukup signifikan. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan rekrutmen usia produktif, peningkatan kesejahteraan, serta penyediaan sarana prasarana menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Satlinmas ke depan. **Keterbatasan Penelitian**, ruang lingkup yang terbatas hanya pada satu kecamatan, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk wilayah Kabupaten Dairi atau daerah lainnya. Selain itu, jumlah informan yang diwawancarai juga masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan berbagai perspektif yang mungkin muncul, terutama dari unsur masyarakat luas maupun pemangku kepentingan lintas sektor. **Arah Masa depan Penelitian**, penelitian selanjutnya disarankan agar studi serupa dilakukan di beberapa kecamatan lain guna memperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai efektivitas peran Satlinmas di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode untuk memperkaya data dan analisis, serta mengevaluasi secara lebih spesifik dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja Satlinmas dalam jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, Camat Siempat Nempu Hulu, para Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Nempu Hulu, serta anggota Satlinmas dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan dukungannya, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sarwono, S. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

B. JURNAL ILMIAH

- Arifin, A. (2015). Implementasi tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 636–647.
- Azima, M. F. (2019). Peran lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan tindak pidana (Studi Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah* (Online).
- Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health services research: Developing taxonomy, themes, and theory. *Health Services Research*, 42(4), 1758–1772. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Damara, W. (2020). Implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat studi: Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16.
- Douglas, H. (2022). Data analysis techniques for qualitative study. In M. R. Islam, N. A. Khan, & R. Baikady (Eds.), *Principles of social research methodology* (pp. ...). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_30
- Gunawan, G. (2015). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 347–360.
- Kinasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1), 33–44.
- Kurniawan, R. (2024). Peranan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tahun 2023 (Doctoral dissertation, IPDN).
- Kurhayadi, Kurhayadi. (2024). Enhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8, 4995. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4995>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47.
- Rukmana, M. G., & Ip, S. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2), 67-78.
- Tumalavicius, V., Ivančiks, J., & Karpishchenko, O. (2016). Issues of society security: Public safety under globalisation conditions in Lithuania. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 5, 545–570. [https://doi.org/10.9770/jssi.2016.5.4\(9\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2016.5.4(9))